

■ Editor:
Darto Wahidin



Pemikiran Mahasiswa untuk Kemajuan Indonesia

Angelika Afliantika Jeharut - Kornelia Efriana Mumung - Imam Mustafa Nasution
Setyo Pambudi - Risnanda Amalia - Perseveranda Virgilia Anita Niung - Zahrani Salwa Azizah
Rafi Fauzan Nugraha - Inayah Junika Zahira - Isnaini Septa Azzahra - Hesti Andini
Silmi Aulia Sholeh - Deny Suhendi - Asti Wanda Rinjani - Radhya Putri Salwa Alifah - Heryanti
Muhammad Akmal Farisi - Ayu Pramudita Putri Wardani - Resa Parida
Dauhah Salwa Endah Lestari - Putri Renanda Leksana - Sigit Nurdiansyah
Shyntia Suci Ramadhan - Denti Sulistiawati - Dona Purnama - Sarah Nurulail

Pemikiran Mahasiswa untuk **Kemajuan Indonesia**

Angelika Afliantika Jeharut - Kornelia Efriana Mumung - Imam Mustafa Nasution
Setyo Pambudi - Risananda Amalia - Perseveranda Virgilia Anita Niung - Zahrani Salwa Azizah
Rafi Fauzan Nugraha - Inayah Junika Zahira - Isnaini Septa Azzahra - Hesti Andini
Silmi Aulia Sholeh - Deny Suhendi - Asti Wanda Rinjani - Radhya Putri Salwa Alifah - Heryanti
Muhammad Akmal Farisi - Ayu Pramudita Putri Wardani - Resa Parida
Dauhah Salwa Endah Lestari - Putri Renanda Leksana - Sigit Nurdiansyah
Shyntia Suci Ramadhan - Denti Sulistiawati - Dona Purnama - Sarah Nurulail

Editor: Darto Wahidin



PEMIKIRAN MAHASISWA UNTUK KEMAJUAN INDONESIA

Ditulis oleh:

Angelika Afliantika Jeharut - Kornelia Efriana Mumung - Imam Mustafa Nasution
Setyo Pambudi - Risnanda Amalia - Perseveranda Virgilia Anita Niung - Zahrani Salwa Azizah
Rafi Fauzan Nugraha - Inayah Junika Zahira - Isnaini Septa Azzahra - Hesti Andini
Silmi Aulia Sholeh - Deny Suhendi - Asti Wanda Rinjani - Radhya Putri Salwa Alifah - Heryanti
Muhammad Akmal Farisi - Ayu Pramudita Putri Wardani - Resa Parida
Dauhah Salwa Endah Lestari - Putri Renanda Leksana - Sigit Nurdiansyah
Shyntia Suci Ramadhan - Denti Sulistiawati - Dona Purnama - Sarah Nurulail

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan 1, Juni 2025

Perancang sampul: Noufal Fahriza
Penata letak: Rosyiful Aqli

ISBN : 978-634-234-259-6

©Juni 2025
viii+368 hlm. ; 17,6x25 cm.



Prakata

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku kumpulan esai berjudul "Membangun Indonesia untuk Kemajuan Masa Depan" ini dapat disusun dan hadir ke hadapan para pembaca.

Buku ini lahir dari kegelisahan dan harapan akan masa depan Indonesia yang lebih baik. Dalam lintasan sejarah bangsa, mahasiswa selalu menempati posisi strategis sebagai penggerak perubahan. Mereka bukan hanya pewaris masa depan, tetapi juga aktor utama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan: keadilan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan, dan peradaban yang bermartabat.

Esai-esai dalam buku ini merupakan refleksi, kritik, dan tawaran solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi mahasiswa dan bangsa Indonesia secara umum. Dengan beragam tema—dari pendidikan, kepemimpinan, literasi, hingga peran sosial—penulis berupaya mengangkat suara dan gagasan yang jernih demi memperkaya wacana kebangsaan dan mendorong lahirnya mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh secara moral dan sosial.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Namun besar harapan kami, kumpulan esai ini dapat menjadi pemantik diskusi, pembelajaran, dan aksi nyata dalam membangun karakter serta daya pikir mahasiswa Indonesia di tengah tantangan zaman yang terus berkembang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan buku

ini. Semoga buku ini memberi manfaat, menginspirasi, dan menumbuhkan semangat juang yang baru dalam diri setiap mahasiswa—demi Indonesia yang lebih maju, adil, dan bermartabat.



Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	v

MEMBANGUN INDONESIA UNTUK KEMAJUAN MASA DEPAN.....	2
Darto Wahidin	

HUKUM

DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.....	10
Angelika Afliantika Jeharut	

REFORMASI HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN.....	20
Kornelia Efriana Mumung	

KEDUDUKAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL ..	29
Imam Mustafa Nasution	

PENTINGNYA KESADARAN HUKUM UNTUK PENCEGAHAN KONFLIK	42
Setyo Pambudi	

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS ..	60
Risnanda Amalia	

PERAN HUKUM DALAM PENANGANAN KEJAHATAN SIBER.....	86
Perseveranda Virgilia Anita Niung	

KEWARGANEGARAAN

PANCASILA SEBAGAI BENTENG KETAHANAN NASIONAL DI ERA REVOLUSI 4.0.....	102
Zahrani Salwa Azizah	

PANCASILA SEBAGAI MODAL SOSIAL.....	115
Rafi Fauzan Nugraha	

Kewarganegaraan dalam Konteks Multikultural	125
Inayah Junika Zahira	

KEWARGANEGARAAN DI ERA MODERN	136
Isnaini Septa Azzahra	

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENCEGAHAN RADIKALISME	151
Hesti Andini	

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL	168
Silmi Aulia Sholeh	

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENYONGSONG ERA <i>SOCIETY</i> 5.0.....	179
Deny Suhendi	

SOSIAL POLITIK

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SOSIAL POLITIK.....	196
Asti Wanda Rinjani	

TRANSFORMASI BIROKRASI MELALUI PENERAPAN <i>E-GOVERNMENT</i>	208
Radhya Putri Salwa Alifah	

PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN POLITIK.....	222
Heryanti	

AKTIVISME DIGITAL DALAM PENINGKATAN KESADARAN POLITIK.....	235
Muhammad Akmal Farisi	
MEDIA SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK	247
Ayu Pramudita Putri Wardani	
MEDIA SOSIAL SEBAGAI PENDUKUNG KOMUNIKASI POLITIK.....	260
Resa Parida	

PENDIDIKAN

MEMBANGUN GENERASI UNGGUL MELALUI PENDIDIKAN	272
Dauhah Salwa Endah Lestari	
PENDIDIKAN SEBAGAI PILAR UTAMA KEMAJUAN BANGSA.....	285
Putri Renanda Leksana	
PENDIDIKAN BERKUALITAS SEBAGAI KUNCI MEMBANGUN GENERASI EMAS.....	302
Sigit Nurdiansyah	
TANTANGAN PENDIDIKAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0	316
Shyntia Suci Ramadhan	
PENDIDIKAN MORAL DI ERA DIGITAL	334
Denti Sulistiawati	
PENDIDIKAN LINGKUNGAN UNTUK MASA DEPAN BERKELANJUTAN	345
Dona Purnama	
URGENSI PENDIDIKAN KEBENCANAAN TERHADAP MASYARAKAT	356
Sarah Nurulail	

Pemikiran Mahasiswa untuk Kemajuan Indonesia



MEMBANGUN INDONESIA UNTUK KEMAJUAN MASA DEPAN

Darto Wahidin

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang
dosen02827@unpam.ac.id

Kemajuan teknologi saat ini telah mengubah cara hidup, bekerja, dan berinteraksi (Al Asy ari & Rahman, 2020). Inovasi dalam bidang digital, kecerdasan buatan, dan akses informasi yang cepat menciptakan peluang dan tantangan baru bagi masyarakat (Hinde *et al.*, 2024). Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan beragam, memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara maju. Namun, untuk mencapai status sebagai negara maju, Indonesia perlu fokus pada beberapa aspek penting, termasuk hukum, kewarganegaraan, pendidikan, dan sosial politik. Dalam konteks ini, kemajuan teknologi tidak hanya sebagai alat, melainkan juga tantangan yang harus dihadapi dengan bijak.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia harus terus beradaptasi dengan dinamika global dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Rohayati & Abdillah, 2024). Dalam hal ini, penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi sangat penting. Hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak dan kebebasan individu (Nurtresna & Mabsuti, 2024). Penegakan hukum yang konsisten dan adil dapat menciptakan

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran masyarakat terhadap hukum juga harus ditingkatkan melalui pendidikan hukum yang memadai. Dengan memahami hak dan kewajiban, masyarakat akan lebih menghargai hukum dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

Hukum seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk kepentingan segelintir orang, melainkan harus mampu membatasi kekuasaan agar semua pihak dapat diadili secara adil. Dalam konteks ini, penting untuk membangun preseden hukum yang baik yang dapat menjadi acuan bagi penegakan hukum di masa depan. Supremasi hukum harus dijunjung tinggi, di mana hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih aman dan terlindungi, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan.

Setelah membahas aspek hukum, perhatian beralih kepada kewarganegaraan. Kewarganegaraan yang baik harus mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam era globalisasi yang semakin kompleks (Treviño *et al.*, 2021). Dalam konteks ini, identitas kewarganegaraan harus inklusif, di mana setiap individu merasa memiliki peran dalam pembangunan nasional. Kewarganegaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang tanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan yang baik harus ditanamkan sejak dini agar generasi mendatang memahami pentingnya berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Kesadaran akan identitas nasional dan rasa kebersamaan perlu ditekankan agar setiap warga negara merasa memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa.

Menghadapi tantangan global memerlukan kewarganegaraan yang adaptif dan kritis. Generasi muda perlu dilatih untuk memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta mampu berpikir kritis dalam menyikapi berbagai isu. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan harus mencakup pengajaran tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan keterlibatan dalam proses politik. Dengan demikian, setiap individu akan mampu berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Aspek pendidikan juga memainkan peranan penting dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman akan menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan teknologi dan keterampilan yang



HUKUM

DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Angelika Afliantika Jeharut

Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang
Yeshajeharut@gmail.com

PENDAHULUAN

Penegakan hukum sebagai elemen vital dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Dalam praktiknya di Indonesia, penegakan hukum kerap menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari lemahnya integritas aparat penegak hukum hingga dominasi kepentingan politik dan ekonomi yang memengaruhi proses peradilan. Di tengah upaya reformasi hukum pasca reformasi 1998, masih banyak celah hukum yang memungkinkan ketimpangan dalam pemberian keadilan kepada masyarakat. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma secara teknis, namun juga menyangkut legitimasi, integritas, dan kepercayaan publik terhadap aparaturnya.

Menurut Arinta (2024), menekankan bahwa kinerja lembaga antikorupsi seperti KPK menjadi cerminan bagaimana hukum ditegakkan. Realitas menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan hukum yang menyentuh ranah politik dan kepentingan kekuasaan. Ketika keadilan hukum dikompromikan

dengan tekanan eksternal, maka hukum kehilangan otoritas moralnya. Situasi ini mengakibatkan munculnya pesimisme masyarakat terhadap supremasi hukum yang semestinya menjadi pilar negara hukum. Tanpa perbaikan menyeluruh terhadap pola kerja dan etika lembaga hukum, Indonesia berpotensi terjebak dalam siklus ketidakadilan sistemik. Oleh karena itu, reformasi penegakan hukum tidak dapat berjalan setengah hati, melainkan harus menyentuh aspek budaya hukum, transparansi, dan profesionalisme kelembagaan. Negara perlu hadir tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi dalam kepastian hukum yang adil bagi seluruh rakyat. Dengan begitu, hukum akan kembali dipercaya sebagai sarana menegakkan nilai keadilan sosial.

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban sosial dan kepastian hukum. Ini terjadi antara lain, berdasarkan fungsi, tugas dan otoritas lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum berdasarkan proporsi ruang lingkup dan dukungan dari sistem kerja sama yang baik dan tujuan yang dicapai. Pengembangan komunitas di mana hukum diberlakukan memengaruhi pola penegakan hukum. Hal ini memengaruhi pola penegakan hukum karena memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi dalam masyarakat modern, yang tinggi dalam organisasi penegakan hukum, semakin kompleks dan sangat birokratis.

Fenomena ketimpangan penegakan hukum di Indonesia tidak hanya berakar pada kelemahan sistem, tetapi juga mencerminkan krisis budaya hukum di tengah masyarakat. Ketika keadilan dipandang sebagai barang mewah yang sulit diakses oleh masyarakat kecil, maka hukum kehilangan fungsi esensialnya sebagai alat kontrol sosial. Dalam realitas sehari-hari, masyarakat menyaksikan praktik diskriminatif, di mana hukum tampak tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Hal ini mengakibatkan jurang kepercayaan publik terhadap sistem hukum semakin melebar. Tidak hanya itu, intervensi dari pihak-pihak berkepentingan juga menciptakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum yang seharusnya bersifat netral dan objektif.

Kondisi lemahnya penegakan hukum di Indonesia tidak hanya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik, tetapi juga memicu ketidakstabilan sosial yang berpotensi mengganggu tatanan demokrasi. Ketika hukum tidak ditegakkan secara adil dan konsisten, muncul rasa ketidakpastian yang melebar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berisiko memperkuat praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang justru memperlemah institusi negara.



KEWARGA- NEGARAAN

PANCASILA SEBAGAI BENTENG KETAHANAN NASIONAL DI ERA REVOLUSI 4.0

Zahrani Salwa Azizah

Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang
zahransalwaa@gmail.com

PENDAHULUAN

Alih-alih para pendiri bangsa Indonesia, justru para pejuanglah yang telah membantu negara ini tetap tangguh. Indonesia telah menjadi incaran banyak negara sejak zaman dahulu karena letaknya di antara 6 LU-11.08'LS dan 95 BT-141-45' BT. Ini termasuk beberapa negara di kawasan selatan Asia, Australia, dan Pasifik barat laut. Garis pantainya mencakup 99.093 km², dan wilayah maritim, termasuk ZEE, sekitar 5,8 juta km, atau 2,75,7% dari negara tersebut. Dari sudut pandang geopolitik, situasi Indonesia mungkin menguntungkan. Posisi geografis adalah posisi suatu negara berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi atau kedudukannya di peta dunia dibandingkan dengan daerah lain (Astana, 2018). Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya jika dilihat dalam konteks pengaturan geografisnya.

Bahaya itu berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Sebagai sebuah negara, Indonesia tidak pernah bersikap tegas terhadap bahaya yang tidak terduga yang dihadapi warga negaranya sendiri. Nasionalisme dan ancaman dari luar terbukti dapat dikelola oleh bangsa Indonesia sejauh ini. Cinta tanah air dan patriotisme merupakan ciri khas identitas Indonesia, begitu pula rasa bela negara dan partisipasi dalam urusan nasional. Di tengah revolusi 4.0, kemajuan digital, otomatisasi, dan konektivitas melanda Indonesia dengan kecepatan yang luar biasa, membentuk kembali tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya negara ini. Integrasi teknologi, seperti *Internet of Things* (IoT), komputasi awan, big data, dan kecerdasan buatan (AI). Revolusi industri mengubah metode kerja manusia menjadi otomatis atau berbasis digital melalui inovasi (Suwardana, 2018) berarti mendatangkan potensi baru bagi kemajuan serta bahaya untuk ketahanan bangsa.

Pengamatan terhadap perubahan ini dimulai sejak pergantian abad ke-20. Revolusi keempat memiliki dampak yang luas pada masyarakat Indonesia dan berpotensi untuk memberantas patriotisme dari negara ini. Di era Revolusi 4.0, Pancasila harus dibangun sebagai benteng ketahanan nasional karena merupakan identitas nasional bangsa Indonesia dan hakikat negara ini. Karena populasinya yang beragam, banyaknya agama, dan melimpahnya sumber daya alam, Indonesia sangat rentan terhadap dampak negatif dari disrupsi teknologi. Gejolak Industri 4.0 membuka geopolitik di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik, yang menarik perhatian pada keengganan Indonesia untuk merangkul keterbukaan geopolitik yang dinamis sebagai sesuatu yang tidak boleh diabaikan oleh masyarakat Indonesia (Maharani, 2019).

Filsafat dan dasar negara berlandaskan Pancasila, dan semangat merupakan komponen kunci dalam memperkuat perlawanan. Sebagian pihak memandang sila-sila Pancasila termasuk Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebagai landasan etika dan moral yang dapat dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi asimilasi budaya dari negara lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulisan ini bertujuan untuk mengkaji fungsi Pancasila sebagai benteng pertahanan nasional dalam mempertahankan jati diri bangsa, mengkaji konsep bela negara dalam kerangka ketahanan nasional, serta menganalisis kesiapan negara dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang akan mengkaji



SOSIAL POLITIK

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SOSIAL POLITIK

Asti Wanda Rinjani

Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang
Astiwandarinjani25@gmail.com

PENDAHULUAN

Ketertiban umum merupakan bagian penting dalam kebijakan publik karena menyangkut pengaturan masyarakat demi terciptanya stabilitas sosial dan politik. Istilah ketertiban umum berasal dari dua konsep utama, yaitu: publik dan politik. Secara etimologis, politik berkaitan dengan urusan warga negara dan pemerintahan, sedangkan publik mengacu pada kepentingan bersama banyak orang. Dalam konteks kebijakan, ketertiban umum menandakan bentuk intervensi negara dalam mengelola kepentingan masyarakat luas melalui pedoman dan peraturan yang mendukung integrasi sosial serta keadilan (Kuswandro, 2024).

Ketertiban umum bukan hanya sekedar hasil dari produk hukum, tetapi merupakan refleksi dari dinamika sosial-politik yang kompleks. Menurut Kuswandro (2024), ketertiban umum adalah instrumen negara untuk menjalankan tugas publik melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung integrasi sosial dan pembangunan berkelanjutan. Sayangnya, implementasi kebijakan publik yang mendukung ketertiban ini kerap menemui kendala. Ginting (2023)

menyebutkan bahwa salah satu hambatan utama dalam kebijakan inklusif adanya resistensi dari kelompok masyarakat tertentu terhadap perubahan sosial-politik yang dibawa oleh kebijakan terintegrasi.

Berbagai hambatan lainnya juga muncul, seperti: kurangnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas birokrasi, serta lemahnya integrasi antar aktor negara dan masyarakat sipil. Masalah-masalah ini menunjukkan adanya kesenjangan antar desain kebijakan dengan realitaas sosial yang dihadapi lapangan. Ketiadaan inklusi sosial dalam formulasi kebijakan menyebabkan kebijakan publik menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat (Ginting, 2023). Situasi tersebut mendorong pentingnya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan publik dalam menjamin ketertiban umum yang adil dan berkelanjutan.

Penelitian Prakoso (2023) menemukan bahwa efektivitas kebijakan sektor ini hanya mencapai 58%, mengindikasikan perlunya pendekatan baru dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Salah satu Solusi yang diusulkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat serta integrasi teknologi dalam pelayanan publik (Dewi, 2024). Selain itu, Nurgoho (2018) menekankan pentingnya penerapan prinsip etika kebijakan agar ketertiban umum tidak menjadi alat represif, melainkan mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial. Situasi ini menuntut adanya inovasi strategis, seperti: digitalisasi layanan publik dan penguatan mekanisme dialog antara pemerintah dan warga negara (Dewi, 2024). Tanpa pendekatan yang partisipatif dan beretika, seperti yang diingatkan Nugroho (2018), ketertiban umum justru berisiko menciptakan keteraturan semu yang mengabaikan keadilan.

Hal yang perlu ditelaah bagaimana strategi pemerintahan dalam mengatasi hambatan implementatif dan membangun kemitraan yang kuat antara negara, masyarakat sipil, serta sektor swasta. Secara teoritis, kebijakan ketertiban umum sering dikaji dalam kerangka model komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi (Septia & Arif, 2023). Dari perspektif global, konsep ketertiban umum mencerminkan standar nilai yang berbeda-beda. Nugroho (2018) menekankan bahwa kebijakan publik harus mengedepankan etika kebijakan, termasuk dalam penegakan ketertiban umum. Pendekatan partisipatif dan dialogis antara pemerintah dan masyarakat yang merupakan syarat penting agar kebijakan ketertiban tidak hanya menciptakan keteraturan semu, tetapi juga keadilan sosial yang nyata.



PENDIDIKAN

MEMBANGUN GENERASI UNGGUL MELALUI PENDIDIKAN

Dauhah Salwa Endah Lestari

Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang
dauhahsal@gmail.com

PENDAHULUAN

Generasi unggul merupakan fondasi utama bagi kemajuan dan keberlanjutan suatu bangsa. Mereka adalah sumber daya manusia yang tidak hanya berpendidikan tinggi, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat, keterampilan sosial, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang dinamis. Dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0, masalah yang dihadapi generasi muda menjadi semakin sulit, sehingga mereka tidak hanya harus cerdas secara intelektual, tetapi juga harus unggul dalam kemampuan beradaptasi, keterampilan sosial, dan karakter (Purwanto, 2021). Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa kualitas generasi muda Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti: rendahnya literasi, degradasi moral, dan kurangnya integritas. Hal ini diperparah oleh lemahnya implementasi pendidikan karakter di berbagai jenjang pendidikan.

Sayangnya, realitas pendidikan Indonesia masih jauh dari harapan tersebut. Berbagai masalah struktural dan kultural terus menghambat penciptaan generasi

unggul. Salah satu tantangan utama rendahnya kualitas literasi dan degradasi nilai moral. *Survei Programme for International Student Assessment (PISA)* oleh OECD pada 2018 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat rendah dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains. Hal ini mengindikasikan kegagalan sistem pendidikan dalam mencetak generasi pembelajar sepanjang hayat (OECD, 2019). Lebih jauh, krisis nilai juga semakin mengemuka. Fatimah & Anwar (2023) menyebutkan bahwa banyak peserta didik yang unggul secara kognitif, namun lemah dalam empati dan tanggung jawab sosial. Hal ini diperburuk oleh sistem pendidikan yang terlalu fokus pada hafalan dan nilai ujian, sehingga mengabaikan pendidikan karakter.

Di tengah cepatnya perkembangan teknologi dan informasi, pendidikan Indonesia masih tertinggal dalam menyesuaikan diri dengan tantangan abad ke-21. Sementara negara-negara maju sudah beralih ke model pendidikan berbasis digital dan pembelajaran personalisasi, sistem pendidikan di Indonesia masih bergumul dengan masalah klasik seperti ketimpangan akses, kualitas guru yang belum merata, dan kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif. Menurut Suyanto (2021), sekitar 60% sekolah di daerah tertinggal masih belum memiliki akses internet yang memadai, padahal konektivitas merupakan syarat utama dalam penerapan pembelajaran digital. Selain itu, literasi digital tenaga pendidik pun masih rendah. Studi dari Kebijakan Kemendikbud (2020) menyebutkan bahwa hanya 34% guru di Indonesia yang mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran.

Pendidikan karakter yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi, ternyata belum diimplementasikan secara sistemik dan konsisten. Dalam banyak kasus, pendidikan karakter hanya menjadi slogan dalam dokumen kurikulum tanpa keberlanjutan dalam praktik pembelajaran. Karakter juga bukan dibentuk melalui ceramah atau teori, tetapi melalui keteladanan, pembiasaan, dan lingkungan yang mendukung. Dalam konteks ini, sekolah seharusnya menjadi ekosistem yang menumbuhkan nilai integritas, tanggung jawab, dan empati secara nyata, pendidikan karakter.

Sayangnya, data dari Kementerian Pendidikan (2023) menunjukkan bahwa hanya 28% sekolah yang secara konsisten menerapkan program penguatan pendidikan karakter (PPK) dalam keseharian. Ketimpangan ini berdampak langsung pada perilaku siswa yang semakin permisif terhadap penyimpangan moral, seperti: *bullying*, penyalahgunaan media sosial, hingga intoleransi. Maka,

SARAN

Pendidikan kebencanaan sebaiknya di masukkan secara formal ke dalam kurikulum sejak dini, agar siswa memiliki pemahaman dan kesiapsiagaan sejak usia muda. Pemerintah dan lembaga terkait harus mencakup pembentukan bencana yang sistematis dan berkelanjutan dalam kurikulum formal dan kasual. Komunitas didorong untuk berpartisipasi aktif dalam latihan bencana untuk meningkatkan peraturan dan tanggapan darurat. Media massa dan sosial harus digunakan untuk memfasilitasi penyebaran dan memahami informasi pendidikan untuk pendidikan. Kerja sama yang komprehensif antara pemerintah, akademisi, LSM, dan komunitas lokal penting untuk memperluas ruang lingkup pembentukan bencana. Simulasi dan latihan bencana harian harus dilakukan sehingga orang digunakan dalam prosedur darurat, Melalui pelatihan, *course*, simulasi, dan sosialisasi di tingkat RT/RW, desa, dan komunitas, masyarakat umum dapat memperoleh informasi dan keterampilan praktis menghadapi bencana. Penyampaian informasi bisa dilakukan melalui media sosial, video, *blurb*, radio lokal, dan aplikasi edukatif agar menarik, mudah memahami pada semua lapisan rakyat, termasuk anak-anak dan lansia. Sediakan fasilitas evakuasi, sistem peringatan dini, dan jalur aman yang diketahui serta dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari pendidikan kebencanaan yang aplikatif.

REFERENSI

- Addas, A. Kibsey, S. D., Ng, G., & Walker, T. (2016). Risiko Catastrophic. (28), 157–176.
- Amancik, A, Illahi, B. K, & Saifulloh, P. P. A (2021). Memperbesar Kompetensi Absolut yang Setara Tata Usaha Negara pada Keadaan Cukup Sempit Malapetaka Non Alam di Negara Indonesia. 4(2), 154.
- Andrea, B, & Michele, M (2016). Tidak Berdampak dan Periksa: Pendekatan Baru untuk Pembentukan Bencana di Sekitar Bencana. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 19, 112–117.
- Bajow, N., Djalali, A., Ingrasia, P. L., Ragazzoni, L., Every, H., Bani, I & Corte, F. Della (2016). *Pendengaran Baru Berbasis Komunitas saat ini dalam Kedokteran Bencana untuk Siswa*, 16(1), 1-8.
- Brundiers, K (2018). Educating for Post-Disaster Sustainability Efforts. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 27, 406-414.

- Baytiyeh, H., & Naja, M. K (2017). Students Perceptions of the Flipped Classroom Model in an Engineering Course: a Case Study. *European Journal of Engineering Education*, 42(6), 1048–1061.
- Baytiyeh, H (2018). Apa Instruksi untuk Kegagalan untuk Mengurangi Efek Berulang Dari Bencana pada Penciptaan Tatanan Sosial? Pelajaran dan Masyarakat Perkotaan, 50 (3), 230-250.
- Chou, J. S., Yang, K. H., & Ren, T. C (2015). Ex-Post Evaluation of Preparedness Education in Disaster Prevention, Mitigation and Response. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 12, 188-201.
- Erianjoni, E (2018). Pengembangan Bahan Sosiologis yang tidak Embarrassing untuk Pengurangan Rintangan Berdasarkan Kebijakan Lokal di Kota Padang. *Socius*, (2), 96-107.
- Green, J. J (2016) Menjelajahi Komunitas dan Pengembangan Sosial: Memahami Konsep Tempat Sosial yang Disengaja dan Perubahan Sosial dalam Konteks Globalisasi, yang Diterbitkan dalam *Studi tentang Pekerjaan Sosial*, 26(6), 605-608.
- Hoffmann, R., & Muttarak, R (2017). Ketahui Dari Masa Lalu, Persiapan di Masa Depan: Dampak Pendidikan dan Pengalaman pada Pencegahan Bencana di Filipina dan Thailand. *Pengembangan Dunia*, 96, 32-51. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.02.016>
- Hoque, S.F, Quinn, C, & Sallu, S (2017). Berbagai Mata Pencaharian Adaptasi Terhadap Perubahan Ekologis Sosial di Bangladesh Pesisir. *Perubahan Lingkungan Regional*, 18 (2), 51– 63. <https://doi.org/10.1007/s10113-017-1213-6>
- Islam, M. R (2017). Organisasi Non-Pemerintah dan Pengembangan Masyarakat di Bangladesh. *Pekerjaan Sosial Internasional*, 60, 79–93.
- Kurniawan (2022). Penguatan Mitigasi dan Tanggap Darurat Bencana di Satuan Pendidikan. *2 Recovered December 5, 2024*.
- Mulyasari, F., Takeuchi, Y., & Shaw, R (2015). Chapter 7 Implementation Tools for Disaster Education. *Disaster Education*, 7, 137–151.
- Nifa, F. A. A., Abbas, S. R., Lin, C. K., & Othman, S. N (2017). Developing a Disaster Education Program for Community Safety and Resilience: The Preliminary Phase. *AIP Conference Proceedings*, 1891, 1–7. <https://doi.org/10.1063/1.5005338>

- Nursyabani, N., Putera, R. E., & Kusdarini, K (2020). Mitigasi Bencana dalam Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Gempa Bumi di Universitas Andalas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 81–90. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i2.12>.
- Pascapurnama, D.N., Murakami, A., Chagan-Yasutan, H., Hattori, T., Sasaki, H. & Egawa, S (2018). Pendidikan Kesehatan Terintegrasi untuk Mengurangi Risiko Bencana: Pelajaran dari Pecahnya Penyakit Setelah Bencana Alam di Indonesia. *Menteri: Risiko Bencana Internasional*, 29 (Juli 2017), 9 -102.
- Paudel, J., & Ryu, H (2018). Malapetaka Alam dan Modal Manusia: Kasus Gempa Nepal. Meningkatkan Dunia. *World Development*, 111, 1–12 <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.06.019>
- Prihatiningsih, T. S., Widyandana, Hapsari, E. D., Helmiyati, S., & Ananda, A. J. N (2017). A lesson learnt: Implementation of interprofessional education in disaster management at Faculty of Medicine Universitas Gadjah Mada, Indonesia. *Journal of Interprofessional Education and Practice*, 9, 121–125.
- Shaw, R., Mallick, F. & Takeuchi, Y. (2015). Bab 5: Essence Sebagai Formasi Universitas untuk Mengurangi Risiko Bencana: Perspektif dan Tantangan. 7.95-113. [Http://dx.doi.org/10.1108/mrr-09-2015-0216](http://dx.doi.org/10.1108/mrr-09-2015-0216)
- Suryadi, Y., & Ulya, L. L. H (2024). Penerapan Pendidikan Bencana dalam Membangun Kesiapsiagaan Sekolah Dasar dari Risiko Bencana. *Jurnal Basicedu*, 8(1), 7158.
- Sutopo, P. N. (2015). Membahas Manajemen Bencana di Indonesia yang Diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Sonneborn, O, Miller, C, Head, L. & Cross, R (2018). Pendidikan Bencana dan Ambisi dalam Perawatan Akut: Persimpangan Pengetahuan dan Pembentukan Perawat Profesional Bedah. *Pelatihan Keperawatan Hari Ini*, 65 (Juli 2017), 2329.
- Syaifulloh, M., & Wibowo, B (2017). Nilai-Nilai Edukatif Syair Gulung Sebagai Upaya Pendidikan Kebencanaan Berbasis Komunitas pada Masyarakat Melayu Di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(1).
- Tsai, M. H., Wen, M. C., Chang, Y. L., & Kang, S. C (2015). Game-Based Education for Disaster Prevention. *AI and Society*, 30(4), 463–475.

- Wahyuni, H.I., Fitrah, op.Cit., & Handayani, F. (2018). Analisis Komparatif Adaptasi Sosial dengan Bencana Maritim di Indonesia dan Fiji. *Pacific Journalism Review*, 2 (1),12–36.
- Well, M. K. et al (2017). Persepsi Siswa Tentang Model Kelas Berputar dalam Kursus Teknis:
Studi Kasus. *Jurnal Pendidikan Teknik Eropa*, 2 (6), 108-1061.
- Widodo, B & Nurholis, E (2019). Pendidikan Kewarganegaraan: Upaya untuk Meminimalkan Bencana Sosial. *Jurnal Artefact*, 6 (2), 9-58.
- Zurita, M., Cook, B., Thomsen, D. C., Munro, P. G., Smith, T. F., & Gallina, J (2018). Living with Disasters: Social Capital for Disaster Governance. *Disasters*, 42(3), 571–589.

Pemikiran Mahasiswa untuk **Kemajuan Indonesia**

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia harus terus beradaptasi dengan dinamika global dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi sangat penting. Hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak dan kebebasan individu. Penegakan hukum yang konsisten dan adil dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran masyarakat terhadap hukum juga harus ditingkatkan melalui pendidikan hukum yang memadai. Dengan memahami hak dan kewajiban, masyarakat akan lebih menghargai hukum dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

Hukum seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk kepentingan segelintir orang, melainkan harus mampu membatasi kekuasaan agar semua pihak dapat diadili secara adil. Dalam konteks ini, penting untuk membangun preseden hukum yang baik yang dapat menjadi acuan bagi penegakan hukum di masa depan. Supremasi hukum harus dijunjung tinggi, di mana hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih aman dan terlindungi, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan.



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📌 @litnuspenerbit
📍 literasinusantara_
☎ 085755971589

